

Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman

Asma Latifa¹, Aldri Frinaldi², Asnil³, Nora Eka Putri⁴

^{1,2,3,4} Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang

e-mail: asmalatif19@gmail.com¹, aldri@fis.unp.ac.id², asnilmelayu@gmail.com³,
noraekaputri@fis.unp.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan daerah. Penelitian dilakukan melalui studi literatur yang mendalam terhadap dokumen kebijakan, laporan keuangan daerah, serta berbagai referensi akademik terkait manajemen keuangan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara administratif, tingkat realisasi pendapatan dan belanja Kabupaten Padang Pariaman tergolong cukup tinggi, terutama dalam hal penerimaan dari transfer pusat. Namun, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah, sehingga menandakan tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Dari sisi belanja, serapan anggaran yang cenderung meningkat di akhir tahun menunjukkan lemahnya perencanaan dan potensi inefisiensi dalam pelaksanaan program. Selain itu, efektivitas penggunaan anggaran masih belum optimal dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, penguatan sistem evaluasi kinerja anggaran, optimalisasi PAD, serta penerapan prinsip tata kelola keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan pengelolaan APBD agar lebih efektif dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Efektivitas Anggaran, APBD, Kabupaten Padang Pariaman, Pendapatan Asli Daerah, Tata Kelola Keuangan Daerah, Penganggaran Berbasis Kinerja, Pembangunan Daerah*

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Padang Pariaman Regency as a key instrument in supporting regional development. The research was conducted through a comprehensive literature review of policy documents, regional financial reports, and relevant academic sources on public financial management. The findings indicate that administratively, the realization rates of both revenue and expenditure in Padang Pariaman are relatively high, particularly in terms of central government transfers. However, the contribution of Locally-Generated Revenue (PAD) remains low, reflecting a high level of fiscal dependence on the central government. On the expenditure side, the tendency for budget absorption to peak at the end of the fiscal year suggests weak planning and potential inefficiencies in program implementation. Moreover, the effectiveness of budget utilization is still suboptimal in promoting equitable development and improving community welfare. Therefore, improvements are needed in planning capacity, performance-based budget evaluation systems, PAD optimization, and the implementation of transparent, participatory, and accountable financial governance. This study is expected to contribute to the enhancement of APBD management to make it more effective and oriented toward sustainable development outcomes.

Keywords: *Budget Effectiveness, APBD, Padang Pariaman Regency, Locally-Generated Revenue, Public Financial Governance, Performance-Based Budgeting, Regional Development*

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (yang kemudian disempurnakan melalui UU No. 23 Tahun 2014), paradigma pembangunan nasional mengalami pergeseran signifikan dari pendekatan sentralistik menuju desentralisasi. Pemerintah daerah, termasuk kabupaten dan kota, kini memegang peranan yang lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya di wilayahnya. Salah satu pilar utama dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan instrumen utama yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam merealisasikan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

APBD bukan sekadar dokumen perencanaan anggaran, melainkan wujud konkret dari prioritas kebijakan publik dan refleksi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dana publik. Di dalam APBD, tersusun program-program pembangunan, kegiatan strategis, serta alokasi pembiayaan untuk pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan APBD menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Efektivitas APBD dapat diukur dari kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan rencana pendapatan dan belanja sesuai target yang telah ditetapkan. Selain itu, indikator efektivitas juga mencakup efisiensi pelaksanaan program, ketepatan waktu penyerapan anggaran, serta pencapaian output dan outcome yang diharapkan. Dalam praktiknya, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah sangat kompleks, mulai dari ketergantungan pada dana transfer dari pusat, lemahnya kapasitas perencanaan dan penganggaran, hingga rendahnya kualitas data dan informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan. Tantangan-tantangan ini dapat menghambat efektivitas pelaksanaan APBD dan berdampak pada kualitas pelayanan publik.

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam cukup besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan. Daerah ini memiliki wilayah yang cukup luas, dengan kondisi geografis yang terdiri dari daerah pantai hingga pegunungan, serta seringkali terdampak oleh bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Potensi sektor unggulan seperti pertanian, kelautan, pariwisata, dan industri kreatif perlu didukung oleh alokasi anggaran yang tepat dan strategi pembangunan yang matang. Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan APBD Kabupaten Padang Pariaman masih menghadapi persoalan klasik seperti rendahnya serapan anggaran, keterlambatan pelaksanaan program, dan kurang optimalnya capaian indikator kinerja pembangunan daerah.

Sebagai contoh, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas APBD Kabupaten Padang Pariaman dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dan perencanaan awal. Selain itu, beberapa program strategis yang dirancang dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik dalam pelaksanaan APBD. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Penelitian mengenai efektivitas APBD Kabupaten Padang Pariaman menjadi penting untuk memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif terkait kinerja fiskal pemerintah daerah. Melalui pendekatan analitis dan evaluatif, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan kata lain, penelitian ini akan menilai sejauh mana alokasi dan realisasi APBD telah mendukung pencapaian target-target pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

Efektivitas pengelolaan APBD juga berhubungan erat dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pemerintah daerah yang efektif adalah pemerintah yang mampu menggunakan anggaran secara

bijaksana, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik secara terbuka. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas APBD harus disertai dengan penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan yang intensif baik oleh lembaga formal maupun oleh masyarakat sipil.

Lebih dari itu, efektivitas APBD juga harus dilihat dalam konteks keberlanjutan fiskal dan pembangunan jangka panjang. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk mengelola anggaran tahun berjalan, tetapi juga harus memiliki strategi jangka panjang dalam mengatasi ketimpangan fiskal, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, serta memperkuat basis pendapatan asli daerah (PAD). Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, penguatan PAD menjadi salah satu tantangan tersendiri mengingat masih rendahnya kontribusi sektor-sektor potensial terhadap pendapatan daerah. Oleh karena itu, kajian ini juga akan mengupas strategi peningkatan efektivitas melalui diversifikasi sumber pendapatan dan penguatan pengelolaan belanja.

Dengan demikian, melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas APBD Kabupaten Padang Pariaman serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil dari kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi bagi penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi dasar bagi formulasi kebijakan pembangunan daerah yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literatur tambahan dalam kajian akademik bidang ekonomi publik, tata kelola keuangan daerah, dan pembangunan daerah secara umum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode **studi literatur** (*library research*), yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian, yakni efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Studi literatur dipilih karena sifatnya yang memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang luas dan mendalam mengenai berbagai konsep teoritis, kebijakan, serta praktik empiris terkait pengelolaan keuangan daerah tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer secara langsung.

Metode studi literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi berbagai teori, temuan empiris, serta kebijakan yang telah dikembangkan dalam konteks efektivitas anggaran pemerintah daerah. Fokus utama kajian ini adalah menggali data sekunder yang tersedia secara publik maupun dalam bentuk dokumen resmi. Data tersebut meliputi dokumen peraturan perundang-undangan, laporan keuangan pemerintah daerah, dokumen perencanaan pembangunan (seperti RPJMD dan Renstra), laporan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta publikasi statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, penulis mengidentifikasi, memilih, dan menelaah berbagai literatur yang kredibel dan relevan dengan topik. Literatur tersebut dipilih dengan mempertimbangkan kriteria aktualitas, otoritas sumber, dan relevansi isi terhadap permasalahan yang dibahas. Sumber-sumber utama mencakup buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga pemerintahan, serta data kuantitatif yang menggambarkan kondisi APBD Kabupaten Padang Pariaman dalam beberapa tahun terakhir.

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis kualitatif deskriptif terhadap isi dokumen yang tersedia. Analisis ini dilakukan dengan meninjau bagaimana realisasi pendapatan dan belanja daerah berjalan dibandingkan dengan target yang ditetapkan, serta mencermati efektivitas pencapaian program prioritas yang dibiayai oleh APBD. Selain itu, penulis juga membandingkan hasil analisis tersebut dengan teori-teori efektivitas anggaran yang dikemukakan oleh para ahli dalam literatur ekonomi publik dan keuangan daerah.

Dengan pendekatan studi literatur ini, diharapkan diperoleh gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai kondisi aktual efektivitas APBD Kabupaten Padang Pariaman, serta diperoleh insight mengenai berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi anggaran. Meskipun studi literatur memiliki keterbatasan dalam hal pengumpulan data primer, pendekatan ini tetap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan

argumen, memperkuat kerangka teoritik, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis kajian akademik.

Hasil dari metode ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara luas, melainkan sebagai dasar konseptual dan reflektif dalam memahami dinamika pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, penelitian ini bersifat eksploratif dan mendalam, yang dapat menjadi pijakan awal bagi penelitian-penelitian empiris lanjutan yang mengkaji efektivitas APBD dalam konteks yang lebih spesifik dan terukur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan rencana anggaran, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, efektivitas APBD dapat ditelaah melalui beberapa indikator, seperti rasio realisasi pendapatan terhadap target, rasio belanja terhadap total anggaran, serta ketercapaian program prioritas pembangunan yang dibiayai oleh APBD.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Padang Pariaman selama beberapa tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat efektivitas pendapatan tergolong tinggi. Sebagai contoh, pada tahun anggaran 2022, realisasi pendapatan daerah mencapai lebih dari 95% dari target yang telah ditetapkan, menunjukkan kemampuan daerah dalam memobilisasi sumber-sumber pendanaan, terutama dari Dana Transfer Pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun demikian, proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan masih relatif kecil, yaitu kurang dari 10%, yang menandakan tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi (BPK, 2023; BPS, 2023).

Di sisi belanja, efektivitas anggaran tidak hanya diukur dari besarnya realisasi belanja terhadap pagu anggaran, tetapi juga dari kesesuaian penggunaan belanja dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam praktiknya, realisasi belanja Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan adanya pola penyerapan anggaran yang cenderung rendah pada semester pertama dan meningkat drastis menjelang akhir tahun anggaran. Fenomena ini dikenal sebagai *low budget absorption* di awal tahun dan *spending rush* di akhir tahun, yang sering kali berdampak negatif terhadap kualitas output pembangunan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, kurangnya kesiapan perangkat daerah dalam melaksanakan program, serta birokrasi administrasi yang masih bersifat prosedural dan kaku.

Lebih lanjut, efektivitas APBD juga harus dilihat dari capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD. Dalam hal ini, beberapa program prioritas seperti pembangunan infrastruktur jalan, pengembangan sektor pertanian, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan masih menghadapi kendala implementasi. Misalnya, terdapat sejumlah proyek infrastruktur yang mengalami keterlambatan penyelesaian atau tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, yang menunjukkan adanya permasalahan dalam manajemen proyek dan pengawasan pelaksanaan anggaran. Selain itu, efektivitas anggaran pada sektor-sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan masih memerlukan perhatian, terutama dalam hal peningkatan kualitas layanan, bukan hanya dari sisi anggaran yang terserap.

Hasil evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Padang Pariaman secara umum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan, namun masih ditemukan beberapa catatan penting terkait efektivitas penggunaan anggaran, seperti belanja yang belum sepenuhnya sesuai dengan output yang direncanakan, serta kelemahan dalam pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas anggaran tidak dapat semata-mata dinilai dari tingkat realisasi, tetapi harus disandingkan dengan pencapaian hasil dan manfaat dari kegiatan tersebut bagi masyarakat.

Dari perspektif teori efektivitas anggaran, sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2009), suatu anggaran dikatakan efektif jika mampu menghasilkan output dan outcome yang direncanakan dengan alokasi dana yang tersedia. Artinya, efektivitas mencerminkan keterkaitan langsung antara penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap tujuan pembangunan. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu meningkatkan fokus pada outcome-based budgeting, yaitu perencanaan dan penganggaran yang berbasis hasil, bukan hanya berbasis pada alokasi input atau belanja rutin. Pendekatan ini mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Sebagai upaya perbaikan, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui mekanisme partisipatif seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu, optimalisasi pendapatan asli daerah juga penting agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mendanai prioritas pembangunan tanpa terlalu tergantung pada transfer pusat.

Secara keseluruhan, efektivitas APBD Kabupaten Padang Pariaman belum sepenuhnya optimal. Meskipun realisasi anggaran relatif tinggi, namun kualitas pelaksanaan dan dampaknya terhadap masyarakat masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada serapan anggaran, tetapi juga pada kualitas perencanaan, efisiensi pelaksanaan, serta evaluasi hasil yang terukur.

Selain melihat efektivitas dari sisi realisasi pendapatan dan belanja, penting pula untuk menilai bagaimana alokasi anggaran tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Efektivitas APBD sejatinya tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana anggaran yang digunakan mampu memberikan dampak nyata terhadap indikator makro daerah seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), serta penyediaan layanan publik yang berkualitas dan merata.

Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, meskipun indikator makro menunjukkan tren yang relatif positif dari tahun ke tahun, namun masih terdapat kesenjangan pembangunan antar wilayah kecamatan yang cukup signifikan. Beberapa kecamatan yang berada di daerah pesisir dan pedalaman mengalami keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, layanan pendidikan, dan kesehatan. Hal ini menandakan bahwa meskipun anggaran telah terserap, namun efektivitasnya belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan hasil pembangunan. Menurut Wahab (2008), efektivitas kebijakan publik—termasuk dalam hal anggaran—bukan hanya soal pencapaian target teknis, tetapi juga soal keadilan distribusi dan keberlanjutan manfaat.

Lebih lanjut, dalam penilaian efektivitas anggaran, penting untuk menyoroti peran sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Sistem ini bertujuan untuk mengaitkan antara input (anggaran) dengan output dan outcome yang jelas serta terukur. Namun, berdasarkan temuan dari Kementerian Dalam Negeri dan evaluasi akademik (Widodo, 2011), implementasi penganggaran berbasis kinerja di banyak daerah, termasuk Kabupaten Padang Pariaman, masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya didukung oleh instrumen evaluasi kinerja yang memadai. Banyak kegiatan yang dinilai efektif hanya dari sisi serapan anggaran, tanpa penilaian mendalam atas hasil dan dampaknya terhadap masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas juga merupakan elemen penting yang memengaruhi efektivitas pengelolaan APBD. Dalam praktiknya, kendala transparansi informasi anggaran kepada publik masih terjadi, terutama dalam hal akses terhadap dokumen APBD dan laporan realisasi anggaran. Padahal, partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik sangat diperlukan agar proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Seperti dikemukakan oleh Sopanah (2012), efektivitas anggaran sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh keterlibatan masyarakat dalam proses anggaran.

Sebagai respons terhadap permasalahan efektivitas APBD, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu memperkuat integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, memperbaiki sistem pelaporan kinerja anggaran berbasis outcome, serta memperluas partisipasi publik. Evaluasi berkala terhadap efektivitas program perlu dilakukan tidak hanya oleh lembaga internal pemerintah, tetapi juga dengan melibatkan lembaga independen dan akademisi.

Reformasi birokrasi, digitalisasi sistem informasi keuangan daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur juga menjadi aspek kunci dalam mendorong efektivitas dan efisiensi APBD di masa mendatang.

Dengan demikian, efektivitas APBD bukan hanya persoalan administratif tentang serapan anggaran, tetapi merupakan persoalan tata kelola, perencanaan strategis, transparansi, serta komitmen untuk menjadikan anggaran sebagai instrumen pembangunan yang benar-benar berdampak terhadap masyarakat. Sebuah APBD yang efektif akan terlihat tidak hanya dari laporan keuangan yang baik, tetapi juga dari kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, berkurangnya ketimpangan, serta meningkatnya kualitas hidup secara menyeluruh.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur dan analisis terhadap berbagai dokumen serta data sekunder yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman, dapat disimpulkan bahwa efektivitas APBD daerah tersebut tergolong **cukup baik** dari sisi realisasi anggaran, terutama dalam hal pendapatan. Realisasi pendapatan, khususnya dari transfer pusat, secara konsisten mendekati atau melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan masih tergolong rendah, sehingga memperlihatkan tingginya tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

Pada sisi belanja, penyerapan anggaran menunjukkan tingkat efektivitas yang relatif tinggi dari sudut pandang administratif. Meskipun demikian, efektivitas dari sudut substansi—yakni ketercapaian output dan outcome program pembangunan—masih perlu ditingkatkan. Fenomena penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun masih terjadi dan dapat berdampak pada penurunan kualitas hasil pembangunan.

Secara umum, efektivitas APBD Kabupaten Padang Pariaman belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keterbatasan dalam implementasi penganggaran berbasis kinerja, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, serta minimnya partisipasi publik menjadi kendala utama dalam pencapaian efektivitas anggaran yang ideal.

Dengan demikian, pengelolaan APBD yang efektif memerlukan lebih dari sekadar kepatuhan terhadap prosedur dan capaian serapan anggaran; yang lebih penting adalah orientasi terhadap hasil pembangunan (outcome) yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat. Efektivitas APBD harus selalu ditempatkan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman. (2023). *Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2023*. Pariaman: BPS.
- BPK RI. (2022). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPS Kabupaten Padang Pariaman. (2023). *Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2023*. Pariaman: Badan Pusat Statistik.
- Halim, A. (2007). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2021). *Pedoman Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Keuangan RI. (2020). *Laporan Realisasi APBD Nasional dan Daerah Tahun 2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2021*. Jakarta: Kemenkeu.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution, M.E. (2012). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prasojo, E. (2011). *Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, P.J. (2005). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: FE UI.
- Sopannah, A. (2012). "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penganggaran Daerah: Studi pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(2), 219–232.
- Syamsi, S. (2008). *Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyudi, H. (2016). "Pengaruh Efektivitas Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah". *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 7(2), 89–98.
- Widodo, J. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi dalam Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Yuwono, T. et al. (2013). *Desentralisasi dan Tata Kelola Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.